

ABSTRAK

Pendidikan merupakan hak dasar manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, namun ketidakmerataan akses pendidikan masih menjadi tantangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka rata-rata lama sekolah di Jepara masih di bawah rata-rata nasional, yaitu 8,26 tahun pada 2023. Angka partisipasi murni (APM) jenjang pendidikan menengah mengalami penurunan, yang dapat dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah. Selain itu, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menghadapi tantangan ketidaksesuaian kompetensi dengan tuntutan industri lokal, yang berdampak pada tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT). Hal tersebut menunjukkan permasalahan pada akses layanan pendidikan yang dapat disebabkan oleh ketidakadilan spasial dalam distribusi fasilitas pendidikan di Kabupaten Jepara. Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai kecukupan jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Jepara serta distribusinya yang harus merata di wilayah perkotaan dan pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat pelayanan fasilitas pendidikan di Kabupaten Jepara guna memahami ketimpangan keadilan spasial dan kesesuaian ketersediaan fasilitas pendidikan kejuruan dalam mendukung potensi wilayah. Sasaran penelitian ini meliputi pengukuran tingkat pelayanan fasilitas pendidikan di setiap jenjang (SD, SMP, SMA/SMK) dan keberlanjutan antar jenjang, mengukur ketimpangan fasilitas berdasarkan kecamatan dan status rural urban, serta penilaian kesesuaian pendidikan kejuruan dengan potensi ekonomi.

Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang dijelaskan melalui statistik deskriptif. Selain menggunakan analisis kuantitatif, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan research and development (R & D) atau penelitian dan pengembangan. Penelitian ini mengaplikasikan tiga jenis analisis untuk mengevaluasi sistem pendidikan di Kabupaten Jepara. Pertama, analisis kecukupan daya tampung pendidikan menggunakan rasio kebutuhan dan ketersediaan kursi untuk mengukur kemampuan fasilitas pendidikan dalam memenuhi kebutuhan siswa. Kedua, analisis ketimpangan distribusi fasilitas pendidikan menggunakan Indeks Williamson untuk mengidentifikasi tingkat ketidakmerataan pendidikan antar kecamatan. Sementara pendekatan kuantitatif digunakan untuk analisis ketiga, yaitu analisis kesesuaian kurikulum pendidikan kejuruan dengan potensi ekonomi lokal melalui matriks ceklist kriteria. Hasil penelitian ini diantaranya Nilai tingkat pelayanan fasilitas pendidikan antar wilayah (kecamatan) pada setiap jenjang dan berkelanjutan antar jenjang. Kemudian akan dihasilkan juga tingkat Ketimpangan fasilitas pendidikan di Kabupaten Jepara. Terakhir adalah nilai kesesuaian antara program pendidikan kejuruan di SMK dengan potensi wilayah. Penelitian ini akan memberikan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan pembangunan fasilitas pendidikan dan mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat Jepara. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas pendidikan di Kabupaten Jepara masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi pemerataan akses, ketercukupan daya tampung, maupun relevansi pendidikan kejuruan dengan potensi ekonomi lokal. Meskipun secara umum terdapat peningkatan akses pendidikan, masih ditemukan ketimpangan spasial dalam distribusi sekolah, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Beberapa kecamatan memiliki kelebihan fasilitas, sementara yang lain mengalami kekurangan, yang berdampak pada keterbatasan akses bagi siswa di daerah tertentu.

Kata Kunci: Pendidikan, Keadilan Spasial, Kecukupan, Ketimpangan, Kesesuaian.